



KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM *ZERO NEW STUNTING* DI DESA CIPATIK KABUPATEN BANDUNG BARAT

Mochamad Fajar Mujahid¹⁾

1) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Stunting merupakan permasalahan gizi kronis yang berdampak serius terhadap kualitas sumber daya manusia sehingga penanganannya menjadi prioritas nasional. Salah satu upaya strategis pemerintah adalah Program *Zero New Stunting* yang menuntut keterlibatan aktif pemerintah hingga tingkat desa. Dalam konteks tersebut, kepemimpinan kepala desa memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepemimpinan Kepala Desa dalam pelaksanaan Program *Zero New Stunting* di Desa Cipatik Kabupaten Bandung Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan informan Kepala Desa, tenaga kesehatan, kader posyandu, dan masyarakat. Analisis data menggunakan teori fungsi kepemimpinan Hadari Nawawi yang meliputi fungsi instruktif, konsultatif, partisipatif, delegatif, dan pengendalian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan Kepala Desa Cipatik dalam pelaksanaan Program *Zero New Stunting* belum berjalan optimal. Fungsi instruktif, konsultatif, dan pengendalian telah dilaksanakan, namun fungsi partisipatif dan delegatif masih lemah, khususnya dalam mendorong keterlibatan masyarakat dan koordinasi lintas sektor. Kondisi tersebut berdampak pada belum tercapainya target penurunan stunting di Desa Cipatik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kepemimpinan kepala desa yang lebih partisipatif dan kolaboratif guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program *Zero New Stunting* di tingkat desa.

Kata kunci: Kepemimpinan Kepala Desa, *Zero New Stunting*, Pemerintahan Desa.

Abstract

Stunting is a chronic nutritional problem that has a serious impact on the quality of human resources, making its prevention a national priority. One of the strategic efforts implemented by the government is the *Zero New Stunting* Program, which requires

active involvement from all levels of government, including villages. In this context, the leadership of the village head plays a crucial role in ensuring the effective implementation of the program. This study aims to analyze the leadership of the Village Head in the implementation of the Zero New Stunting Program in Cipatik Village, West Bandung Regency. This research employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving the village head, health workers, posyandu cadres, and community members. Data analysis was conducted using Hadari Nawawi's leadership function theory, which includes instructive, consultative, participatory, delegative, and controlling functions. The results indicate that the leadership of the Cipatik Village Head has not been fully optimal. While instructive, consultative, and controlling functions have been implemented, weaknesses remain in participatory and delegative functions, particularly in encouraging community involvement and cross-sector coordination. This has contributed to the failure to achieve the stunting reduction targets. Therefore, strengthening participatory and collaborative village leadership is necessary to improve the effectiveness of the Zero New Stunting Program at the village level.

Keywords: *Village Head Leadership, Zero New Stunting, Village Government.*

PENDAHULUAN

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan. Permasalahan ini berdampak jangka panjang terhadap perkembangan kognitif, kesehatan, dan produktivitas sumber daya manusia. Pemerintah Indonesia menjadikan percepatan penurunan *stunting* sebagai agenda prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan *stunting*.

Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu daerah dengan prevalensi *stunting* yang masih relatif tinggi di Provinsi Jawa Barat. *Stunting* Di Kabupaten Bandung Barat memiliki data Pada tahun 2013, *prevalensi stunting* di Kabupaten Bandung Barat mencapai 52,55%. Angka ini menurun menjadi 27,30% pada tahun 2022, dan kembali turun menjadi 25,10% pada tahun 2023, Namun berdasarkan data dari Dinas Kesehatan (DINKES) dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perilindungan Perempuan dan Anak (DP2KBP3) pada tahu 2024 angka *stunting* meningkat Kembali menjadi 30,8%. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) No. 53 Tahun 2019 tentang Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* terintegrasi. Meskipun demikian, angka tersebut masih di atas ambang batas yang direkomendasikan oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Kabupaten Banudng Barat sudah melakukan

upaya seperti Program Pelita Bening, Edukasi dan Intervensi Gizi, dan Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPSS). Namun, Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat dalam penanganan kasus *stunting* masih tinggi dan belum mencapai target yaitu di angka 14%.

Desa Cipatik sebagai bagian dari Kecamatan Cihampelas menghadapi tantangan serius dalam menurunkan angka *stunting*. berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari Dinas Pengendali Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak (DP2KBP3A) dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2024 terdapat 60 kasus *stunting*.

Balita Beresiko Stunting

RPR Agustus 2023

RPR Agustus 2022				RPR Agustus 2023					
No.	Kecamatan	Anak Beresiko	Prevalensi Stunting	NO	KECAMATAN	JUMLAH BALITA	STUNTED		
		Sangat Rendah					SANGAT PENDEK	PENDEK	JUMLAH STUNTED %
1	SAGULING	527	22,53%	1	RONGGA	4.408	6	20	26 0,59%
2	CIPONGKOR	2.001	26,06%	2	GUNUNGHALLU	5.996	61	102	163 2,72%
3	CINAMANGKITTA	747	15,87%	3	SINDANGKERTA	5.291	128	201	329 6,22%
4	CIPATAJ	1.022	26,46%	4	CILILIN	6.696	30	95	125 1,87%
5	CISARUA	485	23,03%	5	CIHAMPÉLAS	10.388	111	548	659 6,34%
6	CIPUNDEUY	662	21,88%	6	CIPONGKOR	6.402	116	419	535 8,36%
7	RONGGA	381	9,17%	7	BATUJAJAR	6.963	55	121	176 2,53%
8	GUNUNGHALLU	532	9,10%	8	SAGULING	2.510	57	273	330 13,15%
9	CIHAMPÉLAS	923	8,38%	9	CIPATAT	8.164	214	661	875 10,72%
10	PARONGPONG	402	8,89%	10	PADALARANG	10.224	92	246	338 3,31%
11	CINANDIWETAN	551	0,57%	11	NGAMPRAH	8.577	62	301	363 4,23%
12	BATUJAJAR	389	6,35%	12	PARONGPONG	6.620	90	315	405 6,11%
13	PADALARANG	523	5,10%	13	LIMBANG	11.520	40	184	224 1,94%
14	NGAMPRAH	402	4,86%	14	CISARUA	4.388	79	209	288 6,55%
15	CILILIN	332	4,46%	15	CIKALONGWETAN	8.436	170	185	355 4,21%
16	EMBAUNG	303	2,36%	16	CIPUNDEUY	5.161	128	184	312 6,05%
	TOTAL	9.394	8,16%		JUMLAH	111.804	1.399	4.365	5.764 5,16%

Berdasarkan data Bulan Penimbangan Balita (BPB) Agustus 2023, prevalensi *stunting* Bandung Barat adalah sebesar **5,16%**, dengan jumlah Balita Beresiko *Stunting* sebesar **5.764 balita**.

Sumber: Dinas Kesehatan, RPR Agustus 2022 dan Agustus 2023

Sumber: Dinas Kesehatan, BPB Agustus 2022 dan BPB Agustus 2023

Berdasarkan data di atas menjelaskan bahwa tingkat *stunting* di Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat dari tahun 2022 diangka 8,38% dengan kasus anak pendek dan sangat pendek berjumlah 913 jiwa dan pada tahun 2023 diangka 6,34% dengan berjumlah anak *stunted* 659 jiwa. Dalam hal ini menjelaskan bahwa tingkat *stunting* di Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat terbilang cukup tinggi.

Kepemimpinan merupakan salah satu faktor kunci dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi, baik organisasi formal maupun nonformal. Dalam konteks pemerintahan, kepemimpinan memiliki peran strategis dalam

mengarahkan, mengoordinasikan, serta menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan pembangunan dan pelayanan publik. Seorang pemimpin tidak hanya bertugas sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai penggerak yang mampu memengaruhi perilaku dan sikap anggota organisasi agar bekerja secara efektif dan bertanggung jawab.

Kepala Desa memiliki hak dan wewenang dalam menjalankan roda pemerintahannya, dalam pelaksanaan setiap program yang sudah ditetapkan oleh kepala desa harus ada keterlibatan setiap lapisan masyarakat dan *stakeholder* terkait sehingga pelaksanaan program bisa berjalan dengan baik dan maksimal. Namun, dalam praktiknya kepala desa belum optimal dalam menjalankan fungsinya sebagai pengendali program dan keterlibatan kepala desa dalam pelaksanaan program serta masih banyak masyarakat yang kurang terlibat dalam pelaksanaan program-program desa. *Zero New Stunting* merupakan salah satu program wajib desa dalam menurunkan tingkat *stunting* pada anak di setiap desa. Angka *stunting* di Desa Cipatik memiliki tingkat yang cukup tinggi, hal ini menjadi langkah penting bagi Kepala Desa Cipatik untuk berupaya dalam menurunkan tingkat *stunting* di Desa Cipatik Kabupaten Bandung Barat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya penanggulangan *stunting* tidak hanya bergantung pada kebijakan dan program, tetapi juga pada kualitas kepemimpinan di tingkat desa. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan pada peran kepemimpinan Kepala Desa dalam pelaksanaan Program *Zero New Stunting* di Desa Cipatik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian adalah Desa Cipatik, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat. Informan penelitian terdiri dari Kepala Desa, tenaga kesehatan, kader posyandu, dan masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Kabupaten Bandung Barat adalah kabupaten dari hasil pemekaran dari Kabupate Bandung pada tahun 2008 dan merupakan kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat dengan titik letak ibu kota di Kecamatan Ngamprah. Kabupaten Bandung Barat memiliki luas wilayah sebesar $\pm 1.305,77\text{km}^2$, terdiri dari beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Ngamprah, Kecamatan Lembang, Kecamatan Parongpong, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Padalarang, Kecamatan Batujajar, Kecamatan Cihampelas, Kecamatan Cililin, Kecamatan Cikalongwetan, Kecamatan Cipendeuy, Kecamatan Cipongkor, Kecamatan Gununghalu, Kecamatan Sindangkerta, Kecamatan Rongga, Kecamatan Cipatat, dan Kecamatan Saguling. Pada pertengahan tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat sebanyak 1.884.190 jiwa.

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Penduduk	Kepadatan Penduduk
1	Batujajar	7	113,617	3652.1
2	Cihampelas	10	141,519	3008.5
3	Cikalongwetan	13	133,081	1199.6
4	Cililin	11	99,396	1277.1
5	Cipatat	12	145,548	1155.3
6	Cipendeuy	12	91,345	893.9
7	Cipongkor	14	104,915	1308.8
8	Cisarua	8	82,300	1479.4
9	Gununghalu	9	81,759	525.9
10	Lembang	16	203,232	2069.2
11	Ngamprah	11	183,294	5141.5
12	Padalarang	10	187,710	3635.7
13	Parongpong	7	116,680	2591.7
14	Rongga	8	62.969	559.0
15	Saguling	6	35,634	690.8
16	Sindangkerta	11	76,637	721.0

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat, 2023

Desa Cipatik merupakan Desa yang terletak di Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat. Desa Cipatik memiliki batas-batas wilayah dengan desa-desa yang lain seperti Desa Selacau, Desa Situwangi, dan Desa Jelegong. Desa Cipatik terkenal dengan memiliki lahan pertanian yang cukup subur untuk berbagai jenis tanaman terutama tanaman pangan, jika ini dikelola dengan baik maka Desa Cipatik memiliki potensi yang cukup baik dalam bidang agricultural sehingga dapat meningkatkan sistem perekonomian di desa.

Pelaksanaan Program *Zero New Stunting* di Desa Cipatik Kabupaten Bandung Barat tidak dapat dilepaskan dari peran strategis kepemimpinan Kepala Desa sebagai penggerak utama pemerintahan desa. Dalam konteks ini, kepala desa tidak hanya berfungsi sebagai administrator, tetapi juga sebagai pemimpin yang mampu mengoordinasikan berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama, khususnya dalam upaya penurunan angka stunting. Berdasarkan hasil penelitian, kepemimpinan Kepala Desa Cipatik dalam pelaksanaan Program *Zero New Stunting* telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal dalam mencapai target yang ditetapkan.

Menurut Hadari Nawawi (2004, hal. 75), mengemukakan bahwa fungsi kepemimpinan terdiri atas lima fungsi pokok kepemimpinan, yaitu fungsi instruktif, fungsi konsultatif, fungsi partisipasi, fungsi delegasi, dan fungsi pengendalian. Fungsi tersebut berorientasi pada dua tugas utama yaitu tugas (*task oriented*) dan fungsi yang berorientasi pada hubungan manusia (*people oriented*) yang berkaitan dengan kemampuan pemimpin dalam merencanakan, mengarahkan, mengoordinasikan, dan mengawasi kegiatan organisasi. Dalam fungsi ini, pemimpin bertanggung jawab memastikan bahwa pekerjaan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, pembagian tugas dilakukan secara jelas, serta setiap anggota memahami peran dan tanggung jawabnya. Dengan demikian, pemimpin berperan sebagai penggerak utama yang menjaga efektivitas dan efisiensi kerja organisasi.

Dengan demikian, fungsi kepemimpinan selanjutnya yang berorientasi pada hubungan manusia menekankan peran pemimpin dalam membina, memelihara, dan mengembangkan hubungan yang harmonis dengan anggota kelompok. Pemimpin dituntut untuk mampu memahami kebutuhan, perasaan, dan motivasi bawahan, serta menciptakan suasana kerja yang kondusif, partisipatif, dan penuh rasa saling percaya. Melalui fungsi ini, pemimpin tidak hanya mengarahkan, tetapi juga memberikan dukungan moral, penghargaan, serta kesempatan bagi anggota untuk berkembang.

Keberhasilan kepemimpinan sangat ditentukan oleh kemampuan pemimpin dalam menjalankan kelima fungsi tersebut secara seimbang. Pemimpin yang hanya menekankan pencapaian tugas tanpa memperhatikan hubungan manusia dapat menimbulkan ketegangan dan menurunkan semangat kerja. Sebaliknya, pemimpin yang terlalu fokus pada hubungan interpersonal tanpa pengendalian tugas yang jelas berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, kepemimpinan yang efektif merupakan kepemimpinan yang mampu memadukan fungsi tugas dan fungsi hubungan manusia secara harmonis sesuai dengan situasi dan kondisi organisasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi instruktif Kepala Desa Cipatik telah memberikan arahan dan instruksi kepada perangkat desa, kader posyandu, serta pihak terkait mengenai pelaksanaan kegiatan penanganan stunting. Instruksi tersebut diwujudkan melalui pembagian tugas dan pelaksanaan program-program kesehatan seperti posyandu, pemantauan tumbuh kembang balita, serta kegiatan edukasi gizi. Fungsi Konsultatif Kepala Desa Cipatik telah menjalin komunikasi dengan pihak puskesmas, tenaga kesehatan, dan kader posyandu dalam rangka mendukung pelaksanaan Program *Zero New Stunting*. Konsultasi dilakukan untuk memperoleh masukan terkait kondisi kesehatan balita dan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pencegahan stunting. Fungsi Partisipasi merupakan aspek yang paling lemah dalam kepemimpinan Kepala Desa Cipatik. Partisipasi kepala desa dalam pelaksanaan Program *Zero New Stunting* masih tergolong rendah, baik dalam kegiatan sosialisasi, pemantauan kesehatan balita. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepala desa

belum mampu secara maksimal membangun kesadaran kolektif dan mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya pencegahan stunting. Fungsi Delegasi Kepala Desa Cipatik telah melimpahkan sebagian wewenang kepada perangkat desa dan kader posyandu untuk melaksanakan kegiatan terkait stunting. Namun, delegasi tersebut belum disertai dengan pembagian peran yang jelas serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Fungsi Pengendalian telah dilaksanakan melalui pemantauan kegiatan posyandu dan laporan dari kader serta tenaga kesehatan. Kepala desa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program, namun evaluasi yang dilakukan masih bersifat administratif dan belum menyentuh aspek capaian hasil secara menyeluruh. Hal ini menyebabkan pelaksanaan *Program Zero New Stunting* belum mampu menekan angka stunting secara signifikan sesuai dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah maupun pusat.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan Kepala Desa Cipatik masih cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya partisipatif. Padahal, keberhasilan *Program Zero New Stunting* sangat bergantung pada kolaborasi dan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.

KESIMPULAN

Kepemimpinan Kepala Desa Cipatik dalam pelaksanaan *Program Zero New Stunting* belum berjalan secara optimal. Meskipun fungsi instruktif, konsultatif, dan pengendalian telah dilaksanakan, kelemahan masih ditemukan pada fungsi partisipatif dan delegatif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kepemimpinan yang lebih partisipatif, kolaboratif, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan *Program Zero New Stunting* di Desa Cipatik. Fungsi instruktif telah diwujudkan melalui pemberian arahan dan pembagian tugas kepada perangkat desa, kader posyandu, serta pihak terkait. Namun, pelaksanaannya masih bersifat satu arah dan belum didukung oleh sistem pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan. Fungsi konsultatif juga telah dilakukan melalui komunikasi dengan tenaga kesehatan dan kader posyandu, tetapi belum berlangsung secara rutin dan terstruktur, sehingga

masuk dari berbagai pihak belum sepenuhnya menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, fungsi partisipasi dan delegasi merupakan aspek kepemimpinan yang paling lemah dalam pelaksanaan Program *Zero New Stunting*. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pencegahan stunting masih rendah, dan delegasi wewenang kepada perangkat desa serta kader posyandu belum disertai dengan pembagian peran yang jelas dan penguatan kapasitas sumber daya manusia. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan program belum berjalan secara kolaboratif dan berkelanjutan. Dapat disimpulkan bahwa keberhasilan Program *Zero New Stunting* di Desa Cipatik sangat dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan kepala desa. Diperlukan penguatan kepemimpinan yang lebih partisipatif, kolaboratif, dan responsif agar mampu mendorong keterlibatan aktif masyarakat serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dalam upaya menurunkan angka *stunting* di tingkat desa.

Beberapa saran yang penulis ajukan dalam Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan *Zero New Stunting* Di Desa Cipatik Kabupaten Bandung Barat yaitu: Kepala Desa Cipatik diharapkan mampu meningkatkan fungsi instruktif melalui komunikasi yang lebih jelas, terarah, dan berkelanjutan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam program. Instruksi yang disampaikan secara efektif akan membantu pelaksana memahami tugas dan tanggung jawabnya, sehingga program dapat dijalankan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, fungsi konsultatif perlu ditingkatkan dengan membangun pola komunikasi dua arah antara Kepala Desa dan stakeholder terkait, seperti perangkat desa, kader kesehatan, serta pihak puskesmas. Peneliti juga menyarankan agar Kepala Desa Cipatik dapat lebih aktif menjalankan fungsi partisipasi dengan turut serta secara langsung di lapangan untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan Program *Zero New Stunting*. Melalui komunikasi yang terbuka dan dialogis, proses pengambilan keputusan yang memerlukan pertimbangan dan masukan dari berbagai pihak dapat dilakukan secara bersama-sama melalui forum musyawarah, sehingga keputusan yang dihasilkan lebih tepat, objektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kehadiran pemimpin di tengah pelaksanaan program diharapkan mampu

memberikan motivasi dan meningkatkan komitmen para pelaksana. Di samping itu, pihak puskesmas diharapkan dapat menyalurkan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) sesuai dengan kelompok umur, fungsi delegasi juga perlu diperkuat dengan memberikan kepercayaan dan wewenang yang lebih besar kepada stakeholder atau anggota yang terlibat dalam program. Pendelegasian tugas yang jelas dan proporsional akan mendorong kemandirian, tanggung jawab, serta efektivitas kerja para pelaksana dalam menentukan dan melaksanakan kegiatan yang dibutuhkan, dan yang terakhir, fungsi pengendalian diharapkan dapat ditingkatkan melalui pengawasan dan pengaturan aktivitas pelaksana program secara lebih optimal, pengendalian yang dilakukan secara berkelanjutan dan sistematis akan memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan arahan, prosedur, dan tujuan Program *Zero New Stunting* secara efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Miftah, T. (2010). *Kepemimpinan dan Manajemen*. Jakarta: Devisi Buku Perguruan Tinggi, PT. Raja Grafindo Persada.
- Nawawi, H. (2004). *Kepemimpinan Yang Efektif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rasyid, R. (2002). *Dalam Otonomi atau Federalisme Dampaknya Terhadap Perekonomian, Harian Umum Suara Pembaruan*. Jakarta.
- Siagian, S. (2019). *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulaksana. (2002). *peranan pemimpin informal dalam keberlanjutan kelompok*. Bogor: institute pertanian bogor.
- Wahjosumidjo. (2005). *Kepemimpinan dan Motivasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Jurnal:

- Alimudin, & Sukoco. (2017). The Leadership Style Model That Builds Work Behavior Through Organizational Culture. *JURNAL LENTERA*, Vol.3, No. 2.
- Camelia, R, & Sagara, Y (2024). ... DESA CIPATIK: Upaya Kader Posyandu Dalam Mengurangi Tingkat Stunting di Dusun Satu Desa Cipatik, Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat. *PROCEEDINGS UIN SUNAN ...*, proceedings.uinsgd.ac.id,

- Mustabsiyah, L., Purwaddi, & Kusmaningtyas, N. (2019). *Kepemimpinan Kepala Kelompok Bermain Berbasis Analisis Swot Yang Mendukung Program Pembelajaran* (Vol. Vol. 8, No. 1).
- Pipin. (2005). Peran Satuan Tugas Corona Virus Disease 2019 Dalam Pencegahan Penyebaran Corona Virua Di Kabupaten Lima Puluh Kota. *Jurnal Universitas Islam Riau*, 72.
- Putra, I. W., & Helmi, R. F. (2024). Peran Dinas Kesehatan Dalam Upaya Penanggulangan Stunting di Kabupaten Pasaman Barat. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8 (1)(Vol. 8 No. 1 (2024): April 2024), 8815–8822.
- Putri, E. G. A. (2023). Hubungan Pemberian ASI Eksklusif Dengan Kejadian Stunting Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Semanding. *Jurnal Inovasi Global*, 1(2), 50-59.
- Setiyowati, N, Wahyuningsih, E, & ... (2023). Kepemimpinan Transformasional Dalam Pengentasan Stunting Di Desa Mojokambang, Bandarkedungmulyo, Jombang. *Journal of Public ...*, ejournal.undar.or.id,
- Vinci, A. S., Bachtiar, A., & Parahita, I. G. (2022). Efektivitas edukasi mengenai pencegahan stunting kepada kader: Systematic literature review. *Jurnal Endurance*, 7(1), 66-73.